

FOKUS KEBIJAKAN

STANDARDISASI LHK MENJAGA KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA ALAM

"Standardisasi tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga memastikan bahwa sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk generasi mendatang"

Uus Danu Kusumah

Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen LHK
Email: usdanukusumah@gmail.com

Dinamika permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan semakin kompleks. Saat ini dunia termasuk Indonesia sedang menghadapi *triple planet crisis* yakni perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan polusi.

Sekjen PBB António Guterres dalam pertemuan Stockholm+50 pada 2022 lalu menegaskan *"If we want to survive and thrive, let us protect and nurture our planet, that is our only home. Let us recommit – in words and deeds – to the spirit of responsibility enshrined in the 1972 Stockholm Declaration. Because there is Only One Planet Earth."*

Di satu sisi, Indonesia sedang bekerja keras untuk meningkatkan performa dan sedang mengejar Indonesia Emas 2045 melalui transformasi ekologi, sosial, ekonomi, tata kelola dan sosial budaya. Salah satunya melalui penciptaan lapangan kerja dengan meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan.

Kementerian LHK mengawal terjadinya perjalanan transformasi tersebut menuju sebuah titik keseimbangan di dalam pengelolaan sumber daya alam dengan pondasi asas keberlanjutan atau sustainability serta memperhatikan aspek *Environmental, Social, dan Governance (ESG)*, yang sekaligus mencoba menjawab tantangan terhadap *triple crisis* tersebut melalui penguatan instrumen perencanaan, pengawasan dan pengendalian (Renwasdal).

Kiprah 3 Tahun BSILHK

Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK) merupakan organisasi baru di Kementerian LHK yang diberi mandat untuk menyelenggarakan koordinasi dan perumusan, pengembangan, serta penerapan standar dan penilaian kesesuaian standar instrumen di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Latar belakang penting BSILHK hadir adalah untuk menegaskan bahwa UUCK dapat dilaksanakan dengan tetap menjamin perspektif kelestarian lingkungan. Selain juga berperan dalam agenda nasional lainnya yaitu 1) pengendalian perubahan iklim FoLU Net Sink 2030 dan target *net zero emission* pada tahun 2060 atau lebih cepat; 2) mengawal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara; dan 3) penerapan ekonomi sirkular.

3 tahun sejak terbentuk Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK), telah menunjukkan hasil yang membanggakan terkait penyiapan standar-standar dibidang LHK yang akan semakin memudahkan sistem kerja, sehingga pemanfaatan lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia dapat terjaga dengan ukuran yang jelas dan bisa bermanfaat bagi seluruh anak bangsa.

Kehadiran BSILHK menjadi salah satu bagian dari skenario untuk menopang kemajuan Indonesia dengan tetap menjaga kelestarian alam dan mengoptimalkan kawasan hutan, di



Gambar 1. Sambutan Menteri LHK dalam rangkaian acara Pekan Standar LHK pada tanggal 10 September 2024 di Jakarta

antara kebutuhan pembangunan, manusia serta kelestarian alam.

Pekan Standar LHK 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 10 – 12 September 2024 sebagai upaya untuk mengkomunikasikan kepada publik capaian kerja standardisasi LHK dengan tema Standardisasi LHK Menjaga Keberlanjutan Sumber Daya Alam sangat strategis dan tepat karena esensi keberadaan standar bagi instrumen-instrumen yang ada, adalah menyediakan ukuran-ukuran yang pasti dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan beserta pemanfaatannya di Indonesia. Dalam kegiatan ini diluncurkan 9 standar yang telah ditetapkan oleh Menteri LHK, 54 standar yang telah diaktivasi di Amndalnet serta Sistem Kerja dan Sistem Informasi LiNE BSILHK

3 Layer Tapisan Pengelolaan Lingkungan

Kerja-kerja standar ini merupakan kerja kolaborasi. BSILHK sebagai unit *service function* yang menjadi support sistem bagi Ditjen lain yang berada di *line function*, K/L yang menangani standar serta entitas usaha/kegiatan dan masyarakat luas sebagai penerap standar.

Di tengah arus peningkatan investasi yang harus dikawal agar kualitas lingkungan hidup dan kelestarian hutan tetap terjaga, maka perlu tapisan berlapis. Standardisasi menjadi *layer* pertama. Pemberi izin dalam hal ini Eselon I teknis sebagai *layer* kedua. Apabila terjadi persoalan lingkungan, penegakan hukum merupakan garda terakhir yang akan

ditempuh. Pengendalian lingkungan dan kelestarian hutan dapat diselesaikan di filter pertama dan filter kedua. Hanya dalam keadaan terpaksa dilakukan penegakan hukum. Badan Standardisasi Instrumen LHK mengambil peran di layer pertama.

Dunia akan semakin awas dengan isu lingkungan hidup dan kehutanan. Jadi, di mana-mana standar lingkungan hidup dan kehutanan akan menjadi sesuatu topik besar yang orang perhatikan. Dengan adanya BSILHK, peran standar ke depan semakin besar. Tantangan ke depan misalnya terkait dengan kesiapan Indonesia menjadi anggota OECD, tata kelola yang menjamin karbon berintegritas tinggi, serta persyaratan standar pada perdagangan global.

Lewat berbagai instrumen dan standardisasi yang dilakukan oleh BSILHK, Indonesia bisa memiliki andil tidak hanya dalam skala nasional, tetapi juga dalam skala dunia, dengan menjadikan standar Indonesia diakui oleh dunia. Kementerian LHK bersama para pihak, telah dan akan terus melakukan berbagai inovasi menuju paradigma dan keseimbangan baru. Penguatan standar menjadi bagian pentingnya. KLHK diharapkan mampu menjadi bagian perubahan positif bangsa, mampu berkontribusi memberikan keteladanan (*lead by examples*) di dalam pengelolaan sumber daya alam, baik keteladanan bagi masyarakat di tingkat tapak hingga keteladanan bagi masyarakat global.

Turbulensi yang terjadi dalam pengelolaan sektor lingkungan hidup dan kehutanan perlu diatasi bersama, hingga mampu mewujudkan sebuah keseimbangan (*balance*) yang berkeadilan. Untuk itu, perlu kesadaran semua pihak untuk bersama-sama mendayagunakan standar untuk mengendalikan kualitas lingkungan hidup dan hutan. Peran seluruh jajaran yang mengawal investasi, usaha, perlindungan lingkungan, dan peduli kelestarian hutan untuk bersama-sama menampilkan capaian kerja standardisasi dan kontribusinya pada peningkatan kualitas LHK di Indonesia dan juga dunia menjadi sangat krusial.